

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Sofia Malik, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Jurnal Ius Constituedum , Vo 5 Nomor 2 oktober 2020,

Emilda Firdaus, Badan permusyawaratan desa dalam tiga priode pemerintahan di Indonesia, jurnal ilmu hukum Volume 2 NO.2

Dody Eko Wijayanto, Kepala desa dengan badan permusyawaratan Desa dalam pemebentukan peraturan desa, jurnal idependen Vol. 2 No.1.

Emilda Firdaus, Badan permusyawaratan desa dalam tiga priode pemerintahan di Indonesia, jurnal ilmu hukum Volume 2 No.2.

Sugiman, Pemerintahan Desa, Binamulia Hukum, Vol. 7 No 1, Juli 2018. hlm. 86-87

Gusti Made Bayu Nugraha DKK,*Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume, 2, No.3-Desember 2021.

Pembentukan Peraturan Desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, Made Nurmawati.

Iswanto, Peraturan Desa dan Kedudukan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol.4 No.2, September 2020.

Youla C. Sajangbati, Penyelenggaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang NOMOR 6 Tahun 2014, Lex Adminisstratum, Vol. III/N0.2/April/2015.

Rico Masuara , *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Buku:

- Muhammad Harzal, Kedudukan dan peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa,
- Sudikono Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 49.
- Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, hlm 81.
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Alumni, Bandung: PT., 2014), hlm 217.
- E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 4, 1960, hlm. 17-24
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm. 2.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.
- Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23.
- Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Misdayanti dan Kartasapoetra. 1993. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta; Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm.15
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Kushandajani *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Semarang, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008), hlm.70-71
- Yuliandi. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 25.
- Maria Farida Indrati Soepraoto. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan ; Dasar-Dasar dan Pembentukannya* , Jakarta: Kanisius, hlm 25
- Putra Astomo, Kedudukan dan Pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan,jurnal konstitusi, Volume 15, Nomor 2, juni 2018.
- Jimly Assidiqie,,Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm.63

- Halim, Hamza. Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118..
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.
- M. Firmanhadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, hlm. 1.
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia., hlm. 26.
- Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang
- Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
- Pasal 1 ayat 15 UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Pelaksana
- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Ross Yuliastina, Ach. Andiriyanto, *Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa*, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN ‘Veteran’ Jatim, Volume 9 Nomor 1 April tahun 2019. hlm 4-5
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan
Desa.

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia -Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Peremusyawaratan Desa

Internet :

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, Di Unduh Pada
Hari Selasa Tanggal, 26-juli-2022, Pukul 22:19.

<https://sumber-karangan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/45-DASAR-PENYUSUNAN-PRODUK-HUKUM-DESA>. Di unduh pada tanggal tanggal 30
agustus 2022, pukul 04.33 WIB.

